



DETERMINAN PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Putri Neli Pratiwi

STAIN Bengkalis,

Indonesia

E-mail:

nelipratiwiputri@gmail.com

Firdaus

STAIN Bengkalis,

Indonesia

E-mail:

rinaastuti23072018@gmail.com

Received Desember, 2024

1st Revision: Desember, 2024

Accepted: Desember, 2024

ABSTRACT. Permasalahan pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dana berlebih yang tidak digunakan secara keseluruhan untuk kepentingan daerah dan realisasi dari pendapatan daerah maupun dana perimbangan yang tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor penyerapan anggaran seperti SiLPA, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data keuangan pemerintah yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten Bengkalis periode tahun 2013-2022. Sampel pada penelitian adalah data keuangan jumlah SiLPA, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah. Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan pendekatan data kuantitatif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data uji regresi linier berganda. Belanja Daerah (Y) sebagai variabel bebas dan variabel terikat yaitu SiLPA (X_1), PAD (X_2), Dana Perimbangan (X_3). Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini SiLPA dengan hasil nilai $t_{hitung} = 1,247 < t_{tabel} = 1,94318$ dengan nilai signifikan sebesar ($Sig. 0,259 > (\alpha) = 0,05$), PAD sebesar nilai $t_{hitung} = 0,255 < t_{tabel} = 1,94318$ dan diperoleh hasil nilai signifikan ($Sig. 0,807 > (\alpha) = 0,05$), dan Dana Perimbangan nilai $t_{hitung} = -1,473 > t_{tabel} = -1,94318$ dengan nilai signifikannya sebesar ($Sig. 0,191 > (\alpha) = 0,05$). Berdasarkan hasil uji t_{hitung} tersebut SiLPA, PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Keywords: *SiLPA, PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah*

Pendahuluan

Penyerapan anggaran termasuk salah satu faktor yang menjadi indikator keberhasilan dari program-program kebijakan yang telah dilakukan oleh suatu pemerintahan. Penyerapan anggaran adalah pencairan dari realisasi anggaran sesuai yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).¹ Anggaran belanja akan terserap secara maksimal apabila anggaran tersebut direalisasikan dengan sebaik-baiknya.

¹ Rifka Ramadhani and Mia Angelina Setiawan, "Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 710–26.

Semakin besar anggaran pendapatan yang di peroleh Kabupaten Bengkalis dari berbagai sumber pendapatan daerah tentunya akan semakin berguna untuk membiayai segala kebutuhan daerah. Anggaran pendapatan yang digunakan untuk kepentingan belanja suatu daerah harus mengutamakan daya guna, keefektifan, dan ekonomis sesuai dengan preferensi yang diharapkan sehingga dapat memberikan dorongan terhadap program-program daerah yang strategis.²

Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kepentingan belanja daerah tentunya akan menjadi lebih efektif dan efisien apabila anggaran tersebut dapat terserap secara maksimal³. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Bengkalis masih belum sepenuhnya terserap secara maksimal, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya perbedaan antara realisasi dan jumlah anggaran pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Belanja daerah memiliki tujuan yang sangat berguna untuk daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus membelanjakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya agar tercapainya pelaksanaan perencanaan kebutuhan publik yang telah direncanakan⁴. Salah satu tujuan belanja daerah yaitu untuk memecahkan persoalan-persoalan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.⁵ Akan tetapi pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis anggaran belanja daerah selama sepuluh tahun terakhir ini masih belum di gunakan secara maksimal . Hal ini bisa dilihat dari laporan realisasi anggaran kabupaten Bengkalis yang menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah tidak sebesar anggaran yang diperoleh dan realisasi anggaran yang diperoleh juga melebihi pendapatan anggaran yang didapatkan pemerintah daerah.

Belanja daerah pemerintah kabupaten Bengkalis tidak terserap secara maksimal dikarenakan penggunaan anggaran yang diperoleh tidak sesuai dengan yang seharusnya direalisasikan. Penggunaan anggaran belanja yang tidak terserap secara maksimal tentunya akan berpengaruh terhadap pemerintahan daerah. Belanja daerah pemerintah Kabupaten Bengkalis ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Untuk itu penggunaan anggaran sumber pendapatan tersebut harus digunakan secara efektif dan efisien agar menciptakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Anggaran belanja daerah pemerintah Kabupaten Bengkalis juga tidak akan terserap secara maksimal apabila anggaran yang diperoleh tersebut tidak digunakan secara optimal selama satu periode pelaporan. Adanya anggaran belanja daerah yang tidak terserap secara maksimal ini terjadi karena belum tercapainya realisasi anggaran yang direncanakan selama satu periode pelaporan.

Belanja daerah pemerintah kabupaten Bengkalis belum digunakan secara maksimal. Peneliti melihat bahwa ada tiga faktor serapan anggaran yang bisa menjadi penyebab bahwa realisasi belanja daerah menjadi tidak maksimal dan tidak efektif. Faktor tersebut adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Faktor utama yang menjadi penyebab anggaran tidak terserap secara maksimal adalah SiLPA.

² Ahmad Irfansyah, "Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2020, 58.

³ Billy Yanis Saputra et al., "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BENGKALIS," *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 1137-1141-1137-41.

⁴ Imam Fakhruddin, Billy Yanis Saputra, and Firdaus Firdaus, "PENGARUH RASIO DERAJAT DESENTRALISASI DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKALIS," *ANALISIS: SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING* 14, no. 01 (2024): 1-15.

⁵ Ahmad Irfansyah, "Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin." h. 20.

Pengelolaan anggaran keuangan daerah Kabupaten Bengkalis selama sepuluh tahun terakhir ini masih memiliki SILPA.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang masih memiliki SILPA akan berdampak terhadap pembangunan daerah karena masih ada anggaran yang belum terealisasi secara maksimal⁶. Anggaran keuangan tersebut seharusnya dibelanjakan untuk keperluan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis seperti melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program untuk pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis. Berikut ini tabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis periode tahun 2018-2022.

Tabel 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No	Tahun	SiLPA	
1	2018	Rp	215,501,085,439.46
2	2019	Rp	222,090,595,626.37
3	2020	Rp	151,011,573,806.55
4	2021	Rp	1,113,160,198,889.91
5	2022	Rp	293,268,675,966.33

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkalis (2023)

Berdasarkan Tabel 1 selama lima tahun terakhir Kabupaten Bengkalis masih memiliki dana SiLPA. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tertinggi dapat dilihat pada tahun 2021 dan SiLPA terendah pada tahun 2020. Seharusnya angka SiLPA pada anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis adalah sama dengan nol akan tetapi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut SiLPA masih memiliki jumlah nilai rupiah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode pelaporan seharusnya sepenuhnya dibelanjakan untuk daerah akan tetapi Kabupaten Bengkalis masih belum sepenuhnya membelanjakan anggaran tersebut untuk daerah sehingga mengakibatkan adanya dana berlebih atau yang disebut dengan SiLPA.

Adanya SiLPA yang cukup besar mengindikasikan tidak tepatnya pemerintah dalam melakukan penganggaran sehingga sisa lebih seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik pada tahun berjalan menjadi tertunda. Dalam penyusunan APBD jumlah SiLPA seharusnya adalah sebesar nol artinya penerimaan pembiayaan dapat menutup defisit yang terjadi. Jika masih terdapat SiLPA yang bernilai positif maka terdapat dana pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan daerah maka hal ini dapat ditangani dengan melakukan belanja/pengeluaran daerah sehingga angka SiLPA menjadi nol.⁷

Selain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) faktor kedua yang bisa mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyerapan anggaran belanja daerah yang bersumber dari PAD ini dilakukan berdasarkan target pencapaian PAD daerah. Dalam penyusunan anggaran belanja, pemerintah daerah selalu memperhitungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Berikut ini tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Bengkalis periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian (%)
1	2018	Rp 444.510.450.102,00	Rp 319.280.511.092,11	71,38

⁶ Joni Hendra et al., "Creative Economic Development Strategy of Riau Province Community in As-Syatibi Shariah Maqasid Perspective," *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2022): 291–308.

⁷ Ahmad Irfansyah, "Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SiLPA Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin." h. 58.

2	2019	Rp 429.370.673.127,00	Rp 226.245.884.732,22	52,69
3	2020	Rp 306.842.390.148,00	Rp 251.925.869.915,53	82,1
4	2021	Rp 344.444.325.365,00	Rp 216.507.758.129,72	62,86
5	2022	Rp 344.413.626.080,00	Rp 349.634.385.373,15	101,52

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu (2023)

Berdasarkan Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir anggaran tersebut tidak direalisasikan sesuai dengan anggaran yang diperoleh. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang diperoleh ini bisa dilihat dari pencapaian realisasi PAD. Pencapaian realisasi yang hampir maksimal terdapat pada tahun 2020 dan pencapaian realisasi terendah yaitu pada tahun 2019. Sedangkan pencapaian realisasi anggaran PAD yang dilakukan secara maksimal namun melebihi jumlah anggaran yang diperoleh yaitu pada tahun 2022. Meskipun pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2022 sepenuhnya telah direalisasikan secara maksimal hal tersebut belum bisa dikatakan efektif, dikarenakan penggunaan anggaran yang melebihi jumlah anggaran yang telah diperoleh tersebut tentunya bisa memperburuk perekonomian suatu daerah dan bisa mempengaruhi belanja daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang bisa mendukung anggaran belanja daerah untuk bisa memberikan alokasi belanja kebutuhan pembangunan daerah⁸. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan anggaran yang diperoleh dan di belanjakan untuk kebutuhan publik dalam melengkapi ataupun membenahi fasilitas publik di daerah Kabupaten Bengkulu.

Permasalahan selanjutnya yang bisa mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah pemerintah Kabupaten Bengkulu adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana transfer daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.⁹ Berikut ini tabel Dana Perimbangan periode tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 3. Dana Perimbangan Periode Tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian (%)
1	2018	Rp 2.786.873.027.307,00	Rp 2.783.227.694.772,00	99,87
2	2019	Rp 3.126.744.474.578,00	Rp 3.192.463.207.633,00	102,1
3	2020	Rp 2.244.368.625.485,80	Rp 2.275.653.458.310,00	101,39
4	2021	Rp 2.667.080.654.891,00	Rp 3.642.735.136.775,00	136,58
5	2022	Rp 2.730.252.613.000,00	Rp 2.701.274.490.590,00	98,94

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu (2023)

Berdasarkan Tabel 3 Dana Perimbangan Tahun 2018-2022 dapat diketahui bahwa anggaran dana perimbangan yang diperoleh mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan anggaran yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah realisasi anggaran yang seharusnya dikeluarkan. Pencapaian realisasi anggaran dana perimbangan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya akan tetapi semakin meningkat pencapaian realisasi dana perimbangan tersebut haruslah sesuai dengan jumlah anggaran yang diperoleh¹⁰. Akan tetapi pada tahun 2019 dan 2021 pencapaian

⁸ Billy Yanis Saputra et al., "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BENGKALIS," *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 1137-1141-1137-41.

⁹ Masayu Rahmawati and Catur Martian Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung," *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2017).

¹⁰ Siti Asiam, "Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan; Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 128-36.

realisasi anggaran melebihi target yang seharusnya. Hal tersebut bisa membuat belanja daerah yang dikeluarkan lebih besar dari jumlah anggaran yang diperoleh.

Anggaran belanja yang belum terserap secara maksimal dapat dibuktikan dengan adanya realisasi yang tidak sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Hal tersebut tentunya bisa mempengaruhi belanja daerah. Berikut ini tabel realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Bengkulu periode tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 4. Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu

No	Tahun	Total Belanja Daerah
1	2018	Rp 2.749.971.464.672,27
2	2019	Rp 3.300.154.218.224,97
3	2020	Rp 2.634.561.696.928,84
4	2021	Rp 2.795.384.451.962,36
5	2022	Rp 4.216.524.993.951,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu (2023)

Berdasarkan tabel 4 tentang Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu periode tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah gambaran total realisasi belanja daerah selama satu periode pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pertahunnya. Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total belanja daerah yang berbeda-beda setiap tahunnya ini dikarenakan penggunaan realisasi anggaran yang berbeda pula. Total belanja daerah tersebut masih belum terserap secara maksimal karena setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih memiliki SiLPA, realisasi PAD yang belum direalisasikan sesuai dengan anggaran yang diperoleh, dan penggunaan Dana Perimbangan yang belum maksimal.

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti SILPA, PAD, dan Dana Perimbangan tersebut tentunya bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan baik dari segi pembangunan, akses jalan, pelayanan, membenahi fasilitas-fasilitas maupun sarana prasarana yang dibutuhkan setiap daerah yang ada di Kabupaten maupun pembiayaan lain yang digunakan untuk kepentingan daerah. Oleh karena itu, realisasi belanja daerah harus dilakukan secara optimal agar terciptanya kemajuan pada pemerintahan daerah tersebut dan tentunya hal tersebut bisa memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari para peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pengaruh positif tersebut menandakan bahwa, apabila Dana Perimbangan meningkat dan Pendapatan Asli Daerah meningkat, hal ini akan membuat jumlah alokasi belanja daerah bertambah. Sedangkan penurunan dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah akan menurunkan alokasi belanja daerah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang berpengaruh positif terhadap belanja daerah, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmat Nur Rafi dan Fefri Indra Arza juga menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susiana Marbun, Erna Putri Manalu, dan Yois Nelsari Malau menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak mempunyai pengaruh positif dan juga tidak signifikan terhadap belanja daerah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Telaah Pustaka

Penyerapan Anggaran

Serapan anggaran adalah jumlah anggaran yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi anggaran (LRA). Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi ini bermakna bahwa adanya sisa anggaran pada akhir tahun yang tidak begitu banyak.¹¹

Dalam penyerapan atau realisasi anggaran mencakup satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), realisasi anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Serapan anggaran dimulai pada saat APBD disahkan oleh kepala daerah melalui peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu Serapan anggaran juga merupakan suatu kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran, pemerintah yang telah mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran maka telah membuat perencanaan yang baik, dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas penyerapan anggaran.¹²

Penyerapan anggaran merupakan besaran persentase realisasi serapan anggaran atas anggaran belanja yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada DPRD/kepala daerah berupa laporan keuangan yang disebut laporan realisasi anggaran.¹³ Anggaran PAD, Dana Perimbangan maupun SiLPA merupakan anggaran yang diserap/diperoleh pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja daerah. Oleh karena itu, perbandingan antara anggaran yang telah diperoleh dan dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran itu harus bisa melakukan pencapaian atas evaluasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu.¹⁴

Faktor- Faktor Serapan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.¹⁵ SiLPA merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama satu periode pelaporan. SiLPA juga bisa dikatakan sebagai selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan daerah) dan pengeluaran (belanja daerah) selama satu periode anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).¹⁶

SiLPA merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Jika angka SiLPA

¹¹ Nuwun Priyono, Maya Maghfiroh, and Chaidir Iswanaji, "ANALISIS SERAPAN ANGGARAN SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAN DAMPAKNYA BAGI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 417–26.

¹² Priyono, Maghfiroh, and Iswanaji.

¹³ Syukriy Abdullah et al., "Serapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah: Bukti Empiris Dari Kota Banda Aceh," *Jurnal Akuntansi Publik* 2, no. 1 (2019): 66–83.

¹⁴ Silvia Wulandari and Eka Fauzihardani, "Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Rebudgeting Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 93–110.

¹⁵ Fitri Amelia and Novi Khoiriawati, "ANALISIS SiLPA SEBAGAI ALAT UKUR PENGELOLAAN APBD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR," *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022): 1–20.

¹⁶ Ahmad Irfansyah, "Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SiLPA Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 4, no. 1 (2021): 57–73.

tersebut positif berarti bahwa ada pembiayaan netto setelah dikurangi dengan defisit anggaran, masih tersisa atau dengan penjelasan lain bahwa secara anggaran masih ada dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Jika angka SiLPA tersebut negatif bahwa berarti pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Maka dari itu dapat dicari solusinya yaitu dengan mengusahakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain seperti utang dan lain sebagainya atau dengan mengurangi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sehingga angka SiLPA ini sama dengan nol.¹⁷

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hanya akan terbentuk apabila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan akan lebih besar dibandingkan dengan komponen pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, SiLPA hanya dapat digunakan apabila defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencapai 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan. Menentukan SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dihitung berdasarkan total pemasukan daerah yang dikurangi dengan total pengeluaran daerah.¹⁸

Indikator Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran – Total Belanja

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.¹⁹

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tahapan identifikasi yaitu untuk meneliti dan menentukan sumber PAD melalui sistem identifikasi sumber PAD tersebut dengan benar yang diharapkan dapat memberikan hasil secara maksimal.²⁰ Semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah termasuk sumber pendapatan asli daerah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.²¹

Sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah.²²

Dana Perimbangan

¹⁷ Safira Solga Safitri et al., "Analisis Penyebab Dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso," *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2022): 110–15.

¹⁸ Syofyan Yuliantoni and Fefri Indra Arza, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 1 (2021): 170–87.

¹⁹ Chindy Febry Rori, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 2 (2016).

²⁰ Safiul Huda and Ati Sumiati, "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah," *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 85–100.

²¹ Rahmawati and Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung."

²² Dewi Oktavina, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2012): 89–101.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya dana perimbangan adalah bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Pokok utama dari tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisien fiskal.²³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan menjadi pedoman yang mengatur pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah ini antara lain mengatur bagian daerah dari tiga penerimaan, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Sumber Daya Alam (SDA).²⁴

Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Secara parsial SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah
- H₂ : Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah
- H₃ : Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan data kuantitatif. Pendekatan data kuantitatif adalah penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data, dan performa data. Pendekatan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Daerah yang tertera pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Populasi juga merupakan kelompok besar dan suatu wilayah yang menjadi lingkup penelitian. Dengan begitu, populasi bisa dikatakan sebagai keseluruhan objek dari penelitian^{25, 26, 27, 28, 29}. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan data keuangan pemerintah yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten Bengkalis

²³ Rahmawati and Fajar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung."

²⁴ H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (PT. RajaGrafindon Persada, 2003).

²⁵ Firdaus et al., "Hubungan Risk Profile Dengan Kinerja Keuangan Bank Panin Dubai Syariah 2016-2020," *Al-Bank* 02, no. 01 (2022).

²⁶ Meidyna Putri, Imam Fakhruddin, and Firdaus Firdaus, "Managerial Ownership Structure and Financial Performance," *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 4, no. 1 (2023).

²⁷ Mery Kurnia Illahi, Firdaus Firdaus, and Imam Fakhruddin, "Islamic Banking Performance Based on Profitability Approach of Indonesia Malaysia Islamic Banks," *Talaa: Journal of Islamic Finance* 3, no. 2 (2023): 90–103.

²⁸ Idad Firhan Firdaus, Saifullah, Nurul Huda, "Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat, Tbk Tahun Periode 2015-2019," *Pro Aksi* 08, no. 01 (2021).

²⁹ Firdaus Firdaus, Sri Ika Mulia, and Muhamad Muzamil, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Berzakat Perkebunan Sawit," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 2 (2023): 266–82.

periode tahun 2013-2022. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengambil sampel adalah *non probability sampling* dengan pendekatan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu sampel yang mewakili jumlah populasi, biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Sampel pada penelitian adalah data keuangan jumlah SiLPA, PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu.

Adapun persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan yaitu:³⁰

Rumus regresi linier berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji T (Parsial)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Jumlah nilai taraf signifikan sebesar 0,05 atau 5% sedangkan nilai t_{tabel} diperoleh dari nilai $dk = n-k$ ($10-4=6$) dimana jumlah sampel ($n=10$) dan jumlah variabel bebas dan terikat ($k=4$) sehingga nilai t_{tabel} 1,94318. Adapun hasil uji t hitung yaitu:

**Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5267125588975.584	179026287377 7.376		2.942	.026
SiLPA	.912	.731	.709	1.247	.259
PAD	1.015	3.981	.092	.255	.807
Dana_Perimbangan	-.926	.628	-.820	-1.473	.191

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2023)

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan penyajian data hasil dari pengujian hipotesis yang pertama (H_1) memperlihatkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dari hasil penelitian uji t pada gambar 4.10 di atas dapat diketahui bahwa:

$$t_{hitung} = 1,247 < t_{tabel} = 1,94318$$

Maka diterima H_0 (ditolak H_1)

$$\text{Sig.tabel} = 0,259 > (\alpha) = 0,05$$

Dapat disimpulkan dari hasil uji t tersebut SiLPA (X_1) variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah (Y) sebagai variabel terikat.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian tersebut bisa dilihat seperti dibawah ini:

$$t_{hitung} = 0,255 < t_{tabel} = 1,94318$$

³⁰ M. M. Firdaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0* (CV. Dotplus Publisher, 2021).

Maka diterima H_0 (ditolak H_2)

Sig.tabel = 0,807 > (α) = 0,05

Dari uraian t_{hitung} di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas PAD tidak berpengaruh dan sama sekali tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar t_{hitung} hipotesis ketiga (H_3) diatas Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara negatif terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut juga bisa dilihat dari perhitungan t_{hitung} dan t_{tabel} seperti berikut ini:

$t_{hitung} = -1,473 > t_{tabel} = -1,94318$

Maka diterima H_0 (ditolak H_3)

Sig.tabel = 0,191 > (α) = 0,05

Berdasarkan uraian t_{hitung} tersebut diperoleh bahwa variabel bebas Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Uji F (Serentak)

Pengujian F (serentak) merupakan uji penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* secara bersama-sama (serentak) terhadap variabel *dependent*. Hasil dari pengujian hipotesis ini akan memperlihatkan bahwa apakah variabel bebas SiLPA (X_1), PAD (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3) berpengaruh secara serentak terhadap variabel terikat Belanja Daerah. Untuk melihat signifikansi tersebut yaitu apabila nilai sig < 0,05, maka variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut ini hasil dari uji F hitung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji F (Serentak)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7921945259647 44600000000.0 00	3	26406484198824820000 0000.000	.736	.568 ^b
	Residual	2153366599116 593000000000. 000	6	35889443318609890000 0000.000		
	Total	2945561125081 337700000000. 000	9			

a. Dependent Variable: Belanja_Daerah

b. Predictors: (Constant), Dana_Perimbangan, PAD, SiLPA

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2023)

Berdasarkan Tabel 6. dapat diketahui bahwa:

$F_{hitung} = 0,736 < F_{tabel} = 5,14$

Maka diterima H_0 (ditolak H_5)

Sig.tabel = 0,568 > (α) 0,05

Kesimpulan dari F_{hitung} tersebut adalah tidak adanya pengaruh secara serentak dan secara bersama-sama tidak signifikan antara variabel *independent* (bebas) SiLPA (X_1), PAD (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3) terhadap variabel *dependent* (terikat) Belanja Daerah (Y).

Pembahasan

1. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil dari perhitungan secara parsial dan secara serentak untuk mengetahui pengaruh dari SiLPA (X_1) terhadap Belanja Daerah diperoleh hasil uji t (parsial) dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,247 < t_{tabel} = 1,94318$ dengan nilai signifikan

(Sig. = 0,259 > α 0,05). Dengan begitu H_1 ditolak maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SiLPA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini tidak sejalan dengan hipotesis yang ada pada penelitian yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa SiLPA tidak berpengaruh. SiLPA pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap belanja daerah karena semakin tinggi penggunaan dana SiLPA akan menjadi penyebab belanja daerah menjadi rendah. Dengan begitu meskipun penggunaan dana SiLPA begitu besar ada masanya dimana belanja daerah ini juga tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, adanya dana berlebih selama satu periode anggaran ini sebaiknya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan segala kebutuhan belanja daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Setelah dilakukan pengujian PAD dengan menggunakan uji t (parsial) dan uji F (serentak) diperoleh hasil uji t (parsial) dengan nilai sebesar $t_{hitung} = 0,255 < t_{tabel} = 1,94318$ dan nilai signifikan (Sig. = 0,807 > α) = 0,05. Dengan demikian diperoleh hasil H_2 ditolak, maka dapat disimpulkan PAD tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Selain itu, penelitian ini juga tidak sejalan dengan hipotesis yang ada. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah dikarenakan semakin tinggi pengeluaran pemerintah yang bersumber dari PAD belum tentu belanja daerah meningkat semakin tinggi. Hasil dari penelitian yang menyatakan bahwa PAD tidak signifikan ini disebabkan karena peningkatan sumber PAD tidak sejalan dengan peningkatan belanja daerah.

3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan uji t (parsial) dan uji F (serentak) didapatkan hasil penelitian uji t (parsial) dengan nilai sebesar $t_{hitung} = -1,473 > t_{tabel} = -1,94318$ dengan nilai signifikan (Sig. = 0,191 > α) = 0,05. Diperoleh hasil hipotesis H_3 ditolak yang dapat disimpulkan adalah Dana Perimbangan tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil uji penelitian terakhir yaitu perimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan hipotesis yang ada pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah dana perimbangan yang diperoleh pemerintah belum tentu bisa memaksimalkan dan meningkatkan penggunaan belanja daerah yang telah digunakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Bengkalis
3. Dana Perimbangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis harus menggunakan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah dengan sebaik-baiknya. SiLPA, PAD, dan Dana Perimbangan

ini adalah anggaran yang kegunaannya sama untuk kepentingan daerah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bisa pemeratakan dana anggaran tersebut untuk semua daerah sehingga setiap daerah bisa merasakan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan anggaran daerah sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan memuaskan. Penelitian ini diharapkan bisa dilakukan lagi dengan variabel yang berbeda pula. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah sebagai contoh bahwa pemerintah daerah bisa dipercaya dalam mengelola anggaran daerah dan sebagai bukti bahwa pemerintah daerah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola anggaran daerah dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy, Marwan Muhtar, M. Marwan, and A. Aliamin. "Serapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah: Bukti Empiris Dari Kota Banda Aceh." *Jurnal Akuntansi Publik* 2, no. 1 (2019): 66–83.
- Ahmad Irfansyah. "Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 2020, 58.
- Amelia, Fitri, and Novi Khoiriawati. "ANALISIS SiLPA SEBAGAI ALAT UKUR PENGELOLAAN APBD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 2, no. 1 (2022): 1–20.
- Asiam, Siti. "Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan; Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 128–36.
- Fakhrudin, Imam, Billy Yanis Saputra, and Firdaus Firdaus. "PENGARUH RASIO DERAJAT DESENTRALISASI DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BENGKALIS." *ANALISIS: SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING* 14, no. 01 (2024): 1–15.
- Firdaus, Imam Fakhrudin, Jamiah, Fitri Saphira, Sahyu Saphira, and Saifullah. "Hubungan Risk Profile Dengan Kinerja Keuangan Bank Panin Dubai Syariah 2016-2020." *Al-Bank* 02, no. 01 (2022).
- Firdaus, Firdaus, Sri Ika Mulia, and Muhamad Muzamil. "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Berzakat Perkebunan Sawit." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 2 (2023): 266–82.
- Firdaus, M. M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0*. CV. Dotplus Publisher, 2021.
- Firdaus, Saifullah, Nurul Huda, Idad Firhan. "Analisis Rasio Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat, Tbk Tahun Periode 2015-2019." *Pro Aksi* 08, no. 01 (2021).
- Hendra, Joni, Sugianto Sukiman, Sugianto Sugianto, and Abdul Rasheed Olatunji. "Creative Economic Development Strategy of Riau Province Community in As-Syatibi Shariah Maqasid Perspective." *Ikonomika: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2022): 291–308.
- Huda, Safiul, and Ati Sumiati. "Pengaruh PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 14, no. 1 (2019): 85–100.

- Illahi, Mery Kurnia, Firdaus Firdaus, and Imam Fakhruddin. "Islamic Banking Performance Based on Profitability Approach of Indonesia Malaysia Islamic Banks." *Talaa: Journal of Islamic Finance* 3, no. 2 (2023): 90–103.
- Irfansyah, Ahmad. "Analisis Faktor Penyebab SiLPA Dan SILPA Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 4, no. 1 (2021): 57–73.
- Oktavina, Dewi. "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10, no. 2 (2012): 89–101.
- Priyono, Nuwun, Maya Maghfiroh, and Chaidir Iswanaji. "ANALISIS SERAPAN ANGGARAN SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAN DAMPAKNYA BAGI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 417–26.
- Putri, Meidyana, Imam Fakhruddin, and Firdaus Firdaus. "Managerial Ownership Structure and Financial Performance." *Finansha: Journal of Sharia Financial Management* 4, no. 1 (2023).
- Rahmawati, Masayu, and Catur Martian Fajar. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung." *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2017).
- Ramadhani, Rifka, and Mia Angelina Setiawan. "Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 710–26.
- Rori, Chindy Febry. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 2 (2016).
- Safitri, Safira Solga, Kartika Aryanto, Andriana Andriana, and Arnis Budi Santoso. "Analisis Penyebab Dan Dampak Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bondowoso." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 9, no. 2 (2022): 110–15.
- Saputra, Billy Yanis, Firdaus Firdaus, Imam Fakhruddin, Riki Rianto, Putri Neli Pratiwi, and Nurhayati Nurhayati. "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BENGKALIS." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 1137-1141-1137–41.
- . "PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN BENGKALIS." *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 1137-1141-1137–41.
- Widjaja, H. A. W. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. PT. RajaGrafindon Persada, 2003.
- Wulandari, Silvia, and Eka Fauzihardani. "Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Rebudgeting Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 93–110.
- Yuliantoni, Syofyan, and Fefri Indra Arza. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3, no. 1 (2021): 170–87.